



Inspirasi Keadilan Ensiklik “*Sollicitudo Rei Socialis*” bagi Perjuangan Keadilan di Maluku

Romario Primus Rumlus¹, Januarius Heatubun^{2*}

^{1,2} Program Studi Teologi, Seminari Tinggi Santo Fransiskus Xaverius Ambon, Indonesia

Email : primusrumlus@gmail.com¹, Heatubunjan21@gmail.com²

*Penulis korespondensi: Heatubunjan21@gmail.com

Abstract: *The encyclical Sollicitudo Rei Socialis highlights the Church's concern about social injustice, particularly the condition of the poor who do not have fair access to resources intended for all. As a development of Populorum Progressio, this document emphasizes the importance of integral development centered on human dignity through the priority of solidarity. This article aims to reactualize the teaching of justice in Sollicitudo Rei Socialis and examine its relevance in the context of Maluku society which still faces social inequality, issues of natural resource management, gender inequality, and post-conflict impacts. The analysis is carried out by combining descriptive methods to explain the concept of justice in the encyclical and reflective-analytical methods to interpret and draw its contextual implications for social reality in Maluku. The results of the study indicate that solidarity is not only an individual moral virtue, but also a transformative principle that encompasses structural and cultural dimensions in communal life. In the Maluku context, solidarity plays a crucial role in encouraging active community participation in addressing injustice and restoring social harmony and interfaith tolerance. Therefore, this article emphasizes that solidarity is a relevant and contextual ethical foundation for realizing social justice and shared prosperity.*

Keywords: *Love, Justice, Post-Conflict Recovery, Sollicitudo Rei Socialis, Solidarity.*

Abstrak: Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* menyoroti keprihatinan Gereja tentang ketidakadilan sosial, khususnya kondisi kaum miskin yang tidak memiliki akses yang adil terhadap sumber daya yang diperuntukkan bagi semua. Sebagai pengembangan dari *Populorum Progressio*, dokumen ini menekankan pentingnya pembangunan integral yang berpusat pada martabat manusia melalui prioritas solidaritas. Artikel ini bertujuan untuk mengaktualisasikan kembali ajaran keadilan dalam *Sollicitudo Rei Socialis* dan meneliti relevansinya dalam konteks masyarakat Maluku yang masih menghadapi ketidaksetaraan sosial, masalah pengelolaan sumber daya alam, ketidaksetaraan gender, dan dampak pasca-konflik. Analisis dilakukan dengan menggabungkan metode deskriptif untuk menjelaskan konsep keadilan dalam ensiklik dan metode reflektif-analitis untuk menafsirkan dan menarik implikasi kontekstualnya terhadap realitas sosial di Maluku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa solidaritas bukan hanya kebajikan moral individu, tetapi juga prinsip transformatif yang mencakup dimensi struktural dan budaya dalam kehidupan komunal. Dalam konteks Maluku, solidaritas memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengatasi ketidakadilan dan memulihkan harmoni sosial serta toleransi antaragama. Oleh karena itu, artikel ini menekankan bahwa solidaritas merupakan landasan etika yang relevan dan kontekstual untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran bersama.

Kata Kunci: Cinta Kasih, Keadilan, Pemulihan Pasca-Konflik, *Sollicitudo Rei Socialis*, Solidaritas.

1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa menghayati hidupnya dalam sebuah jalinan relasi. Inilah yang mendasari eksistensi hidup manusia bahwa sejatinya ia tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu terarah pada kehadiran orang lain dalam suatu kebersamaan yang saling membentuk dan mempengaruhi. Dalam pengertian ini, ada ungkapan klasik yang berbunyi “no man is an island” yang hendak menegaskan bahwa kehidupan manusia secara hakiki bersifat relasional. Namun demikian, relasi sosial tersebut tidak selalu berlangsung

dalam sebuah harmoni yang didambakan. Dalam kenyataannya, kehidupan bersama justru seringkali mempertemukan manusia dengan berbagai persoalan sosial yang kompleks, seperti ketimpangan, marginalisasi, dan ketidakadilan yang melukai martabat manusia.

Gereja menampilkan peran dengan caranya menyuarakan keadilan karena hal tersebut merupakan bagian hakiki dari iman, misi profetis, dan tanggung jawab moralnya di tengah dunia. Keberpihakan Gereja pada keyakinan bahwa setiap manusia memiliki martabat luhur sebagai gambar Allah, sehingga menolak segala bentuk ketidakadilan seperti kemiskinan, penindasan, dan diskriminasi, serta terpanggil untuk membela hak-hak manusia. Dalam menjalankan misinya, Gereja membaca tanda-tanda zaman dan melanjutkan tradisi kenabian dengan berpihak pada kaum miskin dan tertindas serta mengkritik struktur sosial yang tidak adil. Gereja menegaskan bahwa iman harus diwujudkan dalam tindakan nyata, di mana cinta kasih hanya menjadi utuh jika diwujudkan dalam keadilan.

Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* adalah wajah nyata Gereja. Ensiklik SRS merupakan salah satu dokumen penting dalam panorama Ajaran Sosial Gereja (ASG) yang menyoroti keprihatinan Gereja terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi umat manusia dari zaman ke zaman. Oleh karena itu, kehadiran ensiklik ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika historis dan sosial yang melatarbelakanginya. Kemunculan SRS dilatarbelakangi oleh keprihatinan Gereja terhadap pelbagai polemik permasalahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, antara Utara dan Selatan (Yohanes Paulus II (1997, nos. 14, 18–20). Sebuah fenomena hidup yang menciptakan kesenjangan sosial antara negara Selatan (miskin) dan Utara (kaya).

Sebagai pengembangan dari *Populorum Progressio*, *Sollicitudo Rei Socialis* menegaskan kembali pentingnya pembangunan integral yang berpusat pada martabat manusia. Ensiklik ini mengkritik secara tajam model pembangunan yang hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan dimensi kemanusiaan, sehingga melahirkan ketimpangan sosial yang semakin tajam. Dalam analisisnya, diperkenalkan pula konsep "struktur dosa" yang menunjukkan bahwa ketidakadilan tidak hanya bersumber dari tindakan individu, tetapi juga tertanam dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks ini, solidaritas dipahami sebagai kebajikan moral yang mendasar, bukan sekadar perasaan simpati, melainkan komitmen aktif dan berkelanjutan untuk memperjuangkan kebaikan bersama, khususnya bagi mereka yang miskin dan tertindas. Dengan demikian, solidaritas menjadi prinsip etis yang mengarahkan manusia pada pembangunan yang lebih manusiawi, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Dalam konteks masyarakat Maluku, refleksi ini menemukan relevansinya yang konkret dan mendesak. Realitas pascakonflik sosial yang masih menyisakan trauma, ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam, ketidaksetaraan gender, serta melemahnya nilai-nilai kearifan lokal menunjukkan bahwa persoalan keadilan masih menjadi tantangan serius. Padahal, masyarakat Maluku memiliki warisan nilai solidaritas yang kaya, seperti *pela gandong*, *ain ni ain*, dan prinsip *hidup basudara*, yang secara substansial sejalan dengan semangat solidaritas dalam Ajaran Sosial Gereja. Namun, dalam dinamika sosial kontemporer, nilai-nilai tersebut seringkali mengalami erosi akibat tekanan ekonomi, politik, dan perubahan sosial yang tidak selalu berpihak pada keadilan.

Bertolak dari latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mereaktualisasi ajaran keadilan dalam *Sollicitudo Rei Socialis* serta mengkaji relevansinya dalam konteks masyarakat Maluku. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan pemikiran klasik dalam ensiklik tersebut dengan perkembangan mutakhir Ajaran Sosial Gereja serta temuan-temuan ilmiah kontemporer, sehingga menghasilkan suatu pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan transformatif. Dengan demikian, solidaritas tidak hanya dipahami sebagai kebajikan moral, melainkan sebagai prinsip yang mencakup dimensi struktural, kultural, dan ekologis dalam perjuangan mewujudkan keadilan sosial, perdamaian, dan kesejahteraan bersama.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teologis-kontekstual. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemaknaan ajaran Gereja dalam dokumen *Sollicitudo Rei Socialis* serta relevansinya dalam realitas sosial masyarakat Maluku. Pendekatan teologis-kontekstual memungkinkan penulis untuk tidak hanya memahami teks secara normatif, tetapi juga mengaitkannya dengan situasi konkret kehidupan sosial.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti dokumen Ajaran Sosial Gereja, buku-buku teologi sosial, artikel jurnal ilmiah, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan persoalan keadilan sosial. Secara khusus, penelitian ini menggunakan ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* sebagai sumber utama, yang kemudian diperkaya dengan dokumen Gereja lainnya serta kajian ilmiah kontemporer mengenai solidaritas, keadilan sosial, dan persoalan sosial-ekologis.

Dalam proses analisis data, penelitian ini memadukan dua metode, yaitu metode deskriptif dan refleksi-analitis. Metode deskriptif digunakan untuk menguraikan secara sistematis latar belakang, konsep keadilan, serta gagasan solidaritas yang terkandung dalam ensiklik. Sementara itu, metode refleksi-analitis digunakan untuk menafsirkan makna teologis dari konsep-konsep tersebut serta menarik implikasinya dalam konteks kehidupan sosial masyarakat Maluku. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya menemukan butir-butir inspiratif dari ajaran ensiklik yang relevan bagi perjuangan keadilan di tingkat lokal.

Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif dan kontekstual, sehingga mampu menghasilkan analisis yang komprehensif dan transformatif dalam menjawab persoalan keadilan sosial di masyarakat.

3. PEMBAHASAN

Lahirnya Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*

Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* (kemudian disingkat SRS) merupakan salah satu dari panorama Ajaran Sosial Gereja (ASG) yang dikeluarkan oleh Bapa Suci Yohanes Paulus II pada tanggal 30 Desember 1987, sebagai peringatan 20 tahun ensiklik "*Populorum Progressio*" yang diterbitkan oleh Paus Paulus VI. Ensiklik SRS sendiri memiliki kekhasan yang bertumpuh pada "keprihatinan Gereja akan masalah-masalah sosial" yang dihadapi manusia. Sebagaimana ensiklik sosial pada umumnya, ensiklik SRS menjadi 'benang merah' dalam mengawal usaha perkembangan bangsa-bangsa sejati seperti yang hendak diajarkan ensiklik *PP*.

Secara historis, kemunculan SRS bertolak dari realitas hidup manusia yang dinilai pincang pada abad ke-18 dan ke-19. Kemajuan dunia dalam dimensi perekonomian yang ditandai dengan kelahiran Revolusi Industri, sesungguhnya belum maksimal membawa manusia pada taraf kehidupan yang sejahtera dan manusiawi. Pada kenyataannya perkembangan sejati dengan fokus pada perkembangan bangsa-bangsa masih menyisakan realitas permasalahan sosial mondial (mendunia). Masalah-masalah sosial, seperti; kesenjangan sosial yang melahirkan permasalahan lain, diantaranya; ketidakadilan, kemiskinan, pengangguran yang terjadi di tengah masyarakat antara Utara dan Selatan sebagai bukti dampak negarif dari Revolusi Industri di Eropa abad tersebut.

Kesenjangan sosial yang kemudian menciptakan jurang pemisah antara keduanya yang begitu tajam. Antara yang (utara vs selatan – kaya vs miskin). Imbasnya, perkembangan terkesan hanya dinikmati oleh sekelompok saja. Dalam konteks tersebut negara utara lebih mendominasi hasil perkembangan, dibandingkan negara selatan yang terbilang miskin dan

menderita serta hidup dalam ketidakadilan menikmati hasil perkembangan yang sejatinya diperuntukan bagi semua orang. Implikasinya pun terbilang pincang, sebab yang kaya tetap kaya, dan orang miskin dan menderita hidup dalam situasi keterlambatan yang mengkhawatirkan (Yohanes Paulus II, 1987, nos. 28, 40).

Gereja berposisi pada kenyataan hidup masyarakat miskin dan menderita melalui ajaran ensiklik SRS. Ini pertanda nyata bahwa Gereja senantiasa membuka mata untuk membaca serta merefleksikan keadaan dunia yang diterpa ragam permasalahan sosial. Kesenjangan yang berbuah dengan memperlihatkan kaum kaya merampas hak dari kaum miskin. Gereja merefleksikan bahwa usaha perkembangan dunia turut serta mereduksi martabat manusia yang sepatutnya dilindungi, serta dijaga hak dan kewajibannya. Semestinya perkembangan sejati yang diharapkan adalah pembangunan yang integral dengan menempatkan manusia sebagai pelaku sekaligus subyek pembangunan, dan bukan menjadi obyek dari pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi hidup yang lebih manusiawi pada semua orang (Kieser, 1992).

Ensiklik SRS menuntut kewajiban moral setiap orang dengan melekatkan diri pada kebajikan solidaritas. Solidaritas adalah jalan yang benar bagi manusia melihat orang lain sebagai sesama yang membutuhkan. Sehingga kesiapsediaan untuk “berkorban” atau berani kehilangan diri demi orang lain (Yohanes Paulus II (1987, nos. 37, 55). Inilah perwujudan solidaritas Allah terhadap manusia. Solidaritas yang bersumber dari cinta kasih-Nya, yang memaknai panggilan manusia untuk berbela rasa kepada sesama. Inilah wujud solidaritas seorang manusia Kristiani.

Arti Keadilan menurut ensiklik SRS

Bertolak dari deskripsi di atas, Apa arti keadilan yang dimaksudkan dalam SRS? Mengapa perlu keadilan? Dan diperuntukan bagi siapa keadilan tersebut? Kiranya inilah yang menjadi pertanyaan penuntun guna memahami keadilan yang disuarakan dalam ensiklik SRS.

Dalam pemahaman umum, keadilan merupakan bentuk pemberian atau perlakuan terhadap orang lain sesuai dengan hak dan kewajibannya (Curran, 2007). Maka hak dan kewajiban setiap orang sangatlah bernilai luhur, sehingga tak boleh dilanggar atau dilenyapkan. Sedangkan dalam konteks ajaran ensiklik SRS, keadilan diartikan sebagai kesejahteraan seluruh umat manusia untuk menikmati sarana kehidupan yang pada mulanya diperuntukkan bagi semua (Yohanes Paulus II, 1987, nos. 28, 40). Hal ini bertolak dari pendasaran keadilan Allah yang menginginkan semua manusia ciptaan-Nya memperoleh hak untuk menjamin hidup yang lebih sejahtera dan manusiawi dalam pemanfaatan hasil perkembangan dunia.

Hal ini didasarkan pada kenyataan ketidakadilan yang terjadi dalam dunia dewasa ini, sebagaimana ditegaskan dalam ensiklik SRS:

bahwa jumlah orang yang memiliki banyak relatif *sedikit* dan mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa jumlahnya *banyak*. Itulah ketidakadilan pembagian yang tidak merata dari barang-barang dan jasa-jasa yang semula diperuntukan bagi semua orang (Yohanes Paulus II, 1987, nos. 28, 40).

Berangkat dari situasi kesenjangan sosial yang menjembatani realitas hidup orang kaya dan miskin, ajaran ensiklik SRS menjadi wujud keterlibatan Gereja menghadapi masalah-masalah sosial tersebut. Gereja dipanggil untuk terlibat aktif dengan menunjukkan nilai-nilai kebenaran yang bermuara pada penegakan buah keadilan yang diidamkan semua orang, yang didorong oleh semangat cinta kasih Allah dalam perwujudan sikap solidaritas. Ajakan Gereja agar setiap orang mewujudkan cinta kasih itu melalui sikap kepedulian dan rasa berbelas rasa terhadap sesama. Sikap solidaritas yang bersumber dari cinta kasih Allah yang bersolider dengan umat manusia. Solidaritas Allah yang terungkap melalui pengorbanan Putra-Nya hingga dipaku pada kayu salib. Maka setiap orang memikul tugas yang serupa untuk siap berkorban demi kehidupan yang layak dari sesamanya (Ohoitumur et al., 2020).

Ensiklik SRS mengajarkan bahwa solidaritas adalah nilai kebajikan kristiani yang semestinya dihidupi setiap orang guna melihat orang lain sebagai sesama yang membutuhkan, bukan semata sebagai alat yang dimanfaatkan. Terlebih sikap solidaritas tersebut mendorong setiap orang dengan andil besarnya guna berketetapan hati untuk terlibat dan berpartisipasi aktif mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera. Kehidupan pahit yang dialami oleh orang miskin dan menderita, yang lemah dan berkekurangan mendorong Gereja menjalankan misi moralnya dengan sikap solidaritas terhadap golongan kaum marginal (miskin-lemah-menderita) untuk menikmati hasil perkembangan secara berkala. Gereja mengajak setiap orang untuk ikut serta menentang ketidakadilan dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia serta berpihak terhadap kaum lemah dan tertindas.

Melalui SRS, Yohanes Paulus II berpesan agar setiap orang mewarisi solidaritas kristiani dalam hidupnya. Setiap orang mampu melihat kenyataan hidup orang lain diluar dirinya yang memiliki kesamaan martabat sebagai bagian dari ciptaan Allah. Melihat sesama dengan perwujudan dirinya untuk berjuang bersama, berkorban bersama dan memberi diri demi membangun kehidupan yang layak dan manusiawi. Itulah tujuan dari perkembangan sejati yang tak harus melenyapkan kodrat manusia sebagai ciptaan yang secitra dengan Allah. Melainkan usaha perkembangan itu mencapai titik terbaiknya dengan saling memanusiakan

sesama. Dengan kata lain, perkembangan sejati harus sampai mencapai taraf hidup kesejahteraan bersama.

Realitas Ketidakadilan di Maluku

Buah-buah pengajaran ensiklik SRS menjadi sebuah dorongan yang tepat, benar dan terarah bagi perjuangan hidup masyarakat Maluku dalam memberantas pelbagai masalah sosial yang menandai pudarnya *spirit* dari falsafah yang menjiwai hidup sosial masyarakat Maluku. Permasalahan sosial yang ada bisa ditelusuri melalui realitas perkembangan Maluku dari tahun ke tahun sosial

Dalam lintasan sejarah sosial Maluku menunjukkan bahwa ketidakadilan telah berakar lama sejak masa konflik hingga masa kini. Konflik Maluku tahun 1999–2003 menjadi titik krisis yang menghancurkan kehidupan masyarakat secara menyeluruh, baik dari segi kemanusiaan, ekonomi, maupun relasi sosial. Kerusakan Maluku menghancurkan kemanusiaan dan peradaan hidup orang Maluku (Wuritmur, 2019). Konflik yang awalnya bersifat lokal berkembang menjadi pertikaian bernuansa etnis dan agama, yang mengakibatkan hilangnya nyawa, trauma berkepanjangan, serta kerusakan besar terhadap fasilitas umum dan tatanan sosial. Selain itu, konflik tersebut juga memperlihatkan adanya kepentingan politik yang memperparah situasi, sehingga masyarakat kecil menjadi korban utama.

Dampaknya berlanjut pada kehancuran ekonomi daerah. Ada istilah yang menyebutkan “Menang jadi arang, kalah jadi abu”, masyarakat dan daerah Maluku sama-sama menderita oleh situasi konflik yang menuai kehancuran belaka. Dalam buku “*The Wonderful Islands Maluku*”, disebutkan bahwa perekonomian makro Maluku terpuruk sampai minus (-) 27,38%, sedangkan perekonomian mikronya mengalami kemandekan ditandai dengan angka inflasi yang tinggi (Andibya et al., 2008). Peristiwa inilah yang menobatkan Maluku sebagai provinsi termiskin di Indonesia pada periode tertentu (saat itu).

Pasca konflik, Maluku menghadapi tantangan serius dalam pemulihan ekonomi dan pembangunan. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, khususnya di sektor kelautan dan energi seperti Blok Masela. Dalam wawancara dan kunjungan kerjanya di Maluku (Jumat, 2 September 2022), Presiden RI, Jokowi Widodo mengungkapkan bahwa proyek Blok Masela belum kunjung dimulai, dikarenakan pengunduran diri dari salah satu investor asing (Nafi'an, 2022), yang membuat pengelolaannya belum optimal dimulai dan memberi dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah, serta kurangnya perhatian terhadap wilayah kepulauan, semakin memperkuat kondisi ketidakadilan yang dialami masyarakat Maluku.

Dalam konteks masa kini, ketidakadilan tidak lagi muncul dalam bentuk konflik terbuka, melainkan dalam bentuk laten seperti kesenjangan sosial dan ketidaksetaraan gender. Kesenjangan sosial terlihat dari perbedaan mencolok antara masyarakat perkotaan dan masyarakat di daerah terpencil, yang masih hidup dalam kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Misalnya kasus kemiskinan dan kelaparan hingga menyebabkan kematian yang dialami oleh sebagian masyarakat Pulau Seram pada tahun 2018 lalu (Suyanto, 2018). Ada juga persoalan tanah yang mengakibatkan adanya potensi konflik yang terjadi di Kepulauan Tanimbar tahun 2022 (Kompas, 2022).

Sementara itu, ketidaksetaraan gender tampak dalam meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan serta masih kuatnya pandangan yang menempatkan perempuan sebagai kelompok yang kurang setara dalam kehidupan sosial. Beberapa tahun terakhir ini, kasus kekerasan atau kejahatan yang terjadi terhadap kaum wanita di Maluku terus mengalami peningkatan yang signifikan. Dari tahun 2017 hingga Mei 2022 tercatat bahwa telah terjadi 222 kasus kekerasan terhadap wanita yang terjadi di Ibukota Ambon (Kompas, 2022).

Dengan demikian, realitas ketidakadilan di Maluku menunjukkan kesinambungan antara masa lalu dan masa kini, dari konflik bersenjata hingga persoalan sosial struktural. Hal ini menegaskan bahwa upaya mewujudkan keadilan sosial di Maluku masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

Buah Inspirasi Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* bagi Kehidupan Sosial

Realitas ketidakadilan yang dihadapi masyarakat Maluku ini menjadi dasar refleksi nilai-nilai inspiratif ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* (SRS). Ensiklik menawarkan arah moral yang jelas bagi manusia dalam membangun kehidupan yang lebih adil, damai, dan sejahtera. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga praktis dan relevan untuk menjawab persoalan sosial konkret.

Cinta Kasih sebagai Roh Penggerak

Ensiklik SRS menegaskan bahwa cinta kasih merupakan dasar utama dari setiap tindakan moral manusia. Dalam menghadapi berbagai persoalan sosial, Gereja dipanggil untuk hadir sebagai pembawa terang yang menuntun manusia menuju perkembangan sejati yang sesuai dengan kehendak Allah. Perkembangan tersebut hanya dapat terwujud apabila manusia menghidupi keadilan dalam tindakan nyata sehari-hari. Cinta kasih Allah menjadi sumber dan motor penggerak bagi manusia untuk bertindak solid terhadap sesamanya (Yohanes Paulus II, 1987, no. 38). Sikap solidaritas yang dimaksudkan bahwa setiap orang berpartisipasi aktif mewujudkan kesejahteraan bersama, dan bukan hanya merasa sepenangungan semata (Kieser, 1992).

Maka dari itu solidaritas tidak hanya dimaknai sesempit rasa simpati, tetapi juga keterlibatan aktif dalam memperjuangkan kesejahteraan bersama, termasuk kesiapsediaan untuk berkorban demi orang lain. Dalam bentuk konkret, solidaritas tampak dalam sikap saling mengasihi, menghargai, menolong, dan berbagi. Dengan demikian, keadilan dan perdamaian tidak mungkin terwujud tanpa cinta kasih yang menggerakkan tindakan manusia. Cinta kasih tersebut berakar pada teladan Allah sendiri, yang menyatakan kasih-Nya melalui kehadiran dan pengorbanan Putra-Nya. Oleh karena itu, manusia dipanggil untuk meneladani kasih Allah dengan membangun relasi yang adil dan manusiawi dalam kehidupan bersama.

Panggilan untuk Berbuat Yang Benar

SRS menekankan bahwa keadilan sejati hanya dapat terwujud melalui tindakan yang berlandaskan kebenaran. Kebenaran di sini bukan sekadar prinsip abstrak, melainkan sikap konkret untuk memperlakukan sesama secara adil sesuai dengan martabatnya dengan memberi penghormatan lebih atas martabat istimewanya sebagai “citra” Allah (Yohanes Paulus II, 1987, no. 33, hlm. 50). Setiap manusia dipanggil untuk melihat orang lain sebagai pribadi yang setara, sehingga tidak boleh menjadi objek eksploitasi atau ketidakadilan (Yohanes Paulus II, 1987, no. 34).

Dalam terang ini, tindakan tidak adil seperti egoisme, eksploitasi sumber daya demi kepentingan pribadi, atau pengabaian terhadap kaum miskin merupakan bentuk penyimpangan dari kebenaran moral. Sebaliknya, tindakan yang benar terwujud dalam sikap menghormati martabat manusia, melindungi yang lemah, serta memperjuangkan kesejahteraan bersama. Itulah perintah mutlak nilai kebenaran terhadap perilaku adil manusia kepada sesama untuk bertindak dengan kasih sayang dan kebaikan (Soetoprawiro, 2003).

Dengan demikian, keadilan tidak dapat dipisahkan dari kebenaran, sebab keduanya menjadi dasar bagi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis. Menghidupi kebenaran berarti mengarahkan setiap tindakan pada kebaikan bersama dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Kebebasan yang Dibarengi Tanggung Jawab

Ensiklik SRS juga menegaskan bahwa manusia adalah pribadi yang bebas, namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak tanpa batas. Kebebasan merupakan bagian dari martabat manusia, tetapi harus dijalankan dalam tanggung jawab moral terhadap sesama. Setiap tindakan bebas selalu mengandung konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan.

Kebebasan yang sejati adalah kebebasan yang mengarah pada kebaikan, yaitu ketika manusia mampu menggunakan kebebasannya untuk membangun relasi yang adil dan solider. Dalam hal ini, kebebasan menghendaki manusia untuk bersikap solider sebab inilah wujud

kebebasan positif yang dimaksudkan SRS. Yang dijemahkanlah arti kebebasan sebagai kemerdekaan:

kemerdekaan yang diberikan Kristus kepada kita (Gal. 5:1) menyemangati kita untuk menjadi *pelayan* bagi semua orang. Jadi proses *perkembangan* dan *pembebasan* mengambil bentuk nyata dalam pelaksanaan *solidaritas*, yaitu dalam cinta kasih dan pengabdian bagi sesama, khususnya yang paling miskin: "karena di mana kebenaran dan cinta hilang, proses pembebasan menghasilkan kematian dari suatu kemerdekaan yang akan kehilangan seluruh dukungan" (Yohanes Paulus II, 1987, no. 48, hlm. 71–72).

Kebebasan tidak boleh merugikan orang lain, melainkan harus menghormati (memerdekakan) orang lain. Oleh karena itu, kebebasan dan tanggung jawab merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

SRS mengajarkan bahwa kebebasan mencapai kepenuhannya ketika manusia mampu menjadi dirinya secara utuh, yaitu dengan menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang. Kebebasan yang demikian mendorong manusia untuk bersikap solider, melayani sesama, dan berkontribusi dalam menciptakan kehidupan yang lebih manusiawi (Yohanes Paulus II, 1987, no. 47). Dengan kata lain, kebebasan sejati terwujud dalam cinta kasih dan pengabdian kepada sesama, terutama kepada mereka yang paling membutuhkan.

Realisasi Inspirasi SRS bagi Perjuangan Keadilan di Maluku

Bertolak dari realitas ketidakadilan yang masih melingkupi masyarakat Maluku, ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* (SRS) menawarkan nilai-nilai moral yang dapat direalisasikan secara konkret dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam upaya membangun kembali kehidupan sosial yang adil, damai, dan sejahtera, sekaligus menjadi arah praksis untuk mengatasi berbagai bentuk ketimpangan yang ada.

Membangun Maluku melalui Sikap Solidaritas

Pengalaman konflik Maluku telah meruntuhkan nilai hidup Masyarakat Maluku. Nilai-nilai persaudaraan yang dalam hidup dahulu menjadi fondasi dan falsafah kehidupan bersama kini runtuh seketika. Konflik tersebut menunjukkan hilangnya penghargaan terhadap martabat manusia, yang berujung pada kekerasan, ketakutan, dan keterpecahan sosial. Dalam konteks ini, SRS menegaskan pentingnya solidaritas sebagai jalan pemulihan (Yohanes Paulus II, 1987, no. 38). Solidaritas oleh SRS dimaknai sebagai nilai "kebajikan (kristiani)" yang menghasut orang hidup dalam pemberian diri secara total, hidup saling mengampuni dan hidup rukun serta damai (Yohanes Paulus II, 1987, no. 40, hlm. 60–61). Sikap ini menuntut keterlibatan aktif

setiap orang dalam membangun kesejahteraan bersama, bukan sekadar rasa simpati secara lisan.

Dengan demikian, mengamalkan solidaritas sebagai suatu nilai Kebajikan yang perlu, maka masyarakat Maluku dapat memulihkan kembali relasi sosial yang rusak, menumbuhkan semangat dan sikap saling memiliki, serta mengatasi struktur ketidakadilan. Solidaritas menjadi dasar penting dalam membangun kehidupan yang rukun, damai, dan berkeadilan.

Memupuk Kembali Sikap Hormat dan Toleransi

Sebagai kelanjutan dari solidaritas, masyarakat Maluku perlu membangun kembali sikap hormat dan toleransi yang sempat runtuh akibat konflik. Nilai-nilai budaya sebagai pranata lokal seperti *Pela Gandong* (Hehanussa, 2009), *Duan-Lolat* (Alaslan & Amtai, 2018), *Kalwedo* (Watloly, 2012), *Basudara Salam*, *Basudara Sarane*, dan *Ain Ni Ain* (Kudubun, 2016), harus dipandang luhur dan menjadi penyemangat untuk membangun hidup bersama yang lebih baik. Kandungan nilai tersebut mengikat semangat persaudaraan yang kuat dan dapat menjadi landasan untuk membangun kembali kehidupan sosial yang harmonis.

Sikap hormat menuntut pengakuan atas martabat setiap pribadi, sedangkan toleransi membuka ruang bagi penerimaan terhadap perbedaan, baik dalam aspek sosial, budaya, maupun agama. Dengan demikian, berbagai bentuk ketidakadilan seperti kesenjangan sosial dan diskriminasi gender dapat diminimalkan melalui relasi yang lebih adil dan manusiawi.

Upaya ini perlu dimulai dari lingkungan keluarga dan terus dikembangkan dalam masyarakat luas melalui pembinaan karakter sejak dini. Dengan demikian, nilai-nilai persaudaraan, keadilan, dan perdamaian dapat bertumbuh secara berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat Maluku.

Membagi Secara Adil Hasil Sumber Daya Alam Maluku

Maluku memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun pengelolaannya belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Ketimpangan pembangunan serta distribusi hasil sumber daya yang tidak merata menyebabkan sebagian masyarakat, terutama di daerah terpencil, masih hidup dalam keterbatasan.

Dalam terang SRS, keadilan menuntut adanya distribusi yang adil atas hasil pembangunan dan kekayaan alam. Sumber daya alam seharusnya dikelola untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat lokal serta pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terpencil.

Dengan pengelolaan yang adil dan merata, potensi sumber daya alam Maluku dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini sekaligus menjadi wujud konkret dari keadilan sosial yang diperjuangkan dalam kehidupan bersama.

4. KESIMPULAN

Persoalan keadilan sosial merupakan realitas nyata yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Dalam dinamika kehidupan bersama, relasi antarmanusia seringkali diwarnai oleh ketimpangan, marginalisasi, dan berbagai bentuk ketidakadilan yang merendahkan martabat manusia. Dalam konteks inilah, Gereja melalui ajaran sosialnya, khususnya dalam Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*, hadir dengan suara kenabiannya untuk menegaskan pentingnya keadilan, cinta kasih, dan keberpihakan kepada kaum miskin serta mereka yang tertindas. Ensiklik juga menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan dan menolak model perkembangan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata.

Ensiklik SRS memberi penegasan bahwa keadilan sejati tidak dapat dilepaskan dari "Solidaritas" sebagai kebajikan moral yang mendasar. Solidaritas bukan sekadar rasa simpati, tetapi merupakan komitmen aktif untuk memperjuangkan kebaikan bersama, terutama bagi mereka yang paling lemah. Dalam terang inilah, keadilan memperlihatkan wajahnya. Keadilan pahami sebagai upaya untuk memastikan bahwa seluruh umat manusia dapat menikmati hasil pembangunan dan sumber daya yang sejatinya diperuntukkan bagi semua. Dengan demikian, solidaritas menjadi prinsip etis yang mengarahkan manusia pada pembangunan yang integral, manusiawi, dan berkeadilan.

Bertolak lebih kontekstual, dalam lingkup hidup dan realitasmasyarakat Maluku, refleksi ini menemukan relevansinya yang sangat konkret. Yang mana diketahui bahwa realitas sejarah menunjukkan bahwa ketidakadilan telah berakar sejak konflik sosial tahun 1999–2003 yang membawa dampak luas bagi kehidupan masyarakat, baik secara kemanusiaan, ekonomi, maupun sosial. Meskipun konflik terbuka telah berlalu, berbagai persoalan sosial lain seperti kesenjangan sosial, ketidaksetaraan gender, serta ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam masih terus berlangsung hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakadilan tidak hanya bersifat insidental, tetapi juga struktural dan berkelanjutan.

Bertolak dari realitas tersebut, nilai-nilai yang ditawarkan dari ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* memberikan arah praksis yang jelas bagi upaya membangun keadilan di Maluku. Solidaritas menjadi dasar utama dalam memulihkan relasi sosial yang rusak akibat konflik,

sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membangun kesejahteraan bersama. Nilai ini perlu diwujudkan secara konkret melalui penguatan sikap hormat dan toleransi, serta melalui upaya menghidupkan kembali kearifan lokal seperti semangat hidup *pela gandong* dan semangat *hidup basudara* yang sejalan dengan prinsip solidaritas kristiani.

Dengan demikian, perjuangan mewujudkan keadilan sosial di Maluku menuntut keterlibatan semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, dalam menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif. Pengelolaan sumber daya alam yang adil, pemerataan pembangunan, serta penghormatan terhadap martabat manusia menjadi langkah konkret yang harus diwujudkan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai solidaritas, kebenaran, dan tanggung jawab moral, masyarakat Maluku diharapkan mampu membangun kehidupan bersama yang lebih damai, harmonis, dan sejahtera. Dengan demikian, solidaritas tidak hanya menjadi konsep moral, tetapi juga kekuatan transformatif dalam mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- . (2022, September 15). Kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Ambon terus meningkat sejak 2017. *Kompas.com*. <https://regional.kompas.com/read/2022/09/15/160625278/kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-ambon-terus-meningkat-sejak-2017?page=all>
- Alaslan, & Amtai. (2018). Analisis nilai-nilai budaya duan lolat berbasis kearifan lokal pada masyarakat Tanimbar di Kabupaten MTB. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(22). <https://doi.org/10.18592/jiu.v1i1.1438>
- Andibya, dkk. (2008). *The wonderfull islands Maluku*. Jakarta: Gibon Books.
- Curran, C. E. (2007). *Buruh, petani dan perang nuklir*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hehanussa, J. (2009). Pela dan gandong: Sebuah model untuk kehidupan bersama dalam konteks pluralisme agama di Maluku. *Jurnal Teologi Kontekstual*, 33(1).
- Kieser, B. (1992). *Solidaritas, 100 tahun ajaran sosial Gereja*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kompas. (2022, Februari 10). Ada 20 potensi konflik batas desa di Kepulauan Tanimbar, ini yang akan dilakukan pemerintah. *Kompas.com*. <https://regional.kompas.com/read/2022/02/10/161626178/ada-20-potensi-konflik-batas-desa-di-kepulauan-tanimbar-ini-yang-akan>
- Kudubun, E. E. (2016). AIN NI AIN: Kajian sosio-kultural masyarakat Kei tentang konsep hidup bersama dalam perbedaan. *Cakrawala*, 5(2).

- Nafi'an, M. (2022, September 2). Jokowi ungkap penyebab proyek Blok Masela tak kunjung mulai. *IDN Times*. <https://www.idntimes.com/business/economy/muhammad-ilman-nafian-2/jokowi-ungkap-penyebab-proyek-blok-masela-tak-kunjung-mulai?page=all>
- Ohoitumur, J., dkk. (2020). *Mysterium crucis-mysterium paschale*. Yogyakarta: Kanisius.
- Prakoso, A. (2017). *Pengantar ilmu hukum*. Surabaya: LaksBang Pressindo.
- Soetoprawiro, K. (2003). *Bukan kapitalisme bukan sosialisme*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suyanto, B. (2018, Agustus 1). Kemiskinan, kelaparan, dan kematian di daerah terpencil. *Detik News*. <https://news.detik.com/kolom/d-4144394/kemiskinan-kelaparan-dan-kematian-di-daerah-terpencil>
- Watloly, A. (2012). Menggali nilai filsafat Kalwedo. *Bulletin Kanjoli*, 6(5).
- Wuritumur, A. (2019). *Suara kemanusiaan di tengah tangisan Maluku*. Yogyakarta: Kanisius.
- Yohanes Paulus II. (1997). *Sollicitudo rei socialis (Keprihatinan akan masalah sosial)* (P. Turang, Pr, Penerj.). Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.